

Digitalisasi Kelembagaan Pedukuhan melalui Sistem Informasi Desa di Dusun Nengahan Bantul DIY

Adhianty Nurjanah¹, Iswanto²

¹Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

²Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: adhianty@umy.ac.id

Article Info

Submitted: 30 January 2021

Revised: 12 April 2021

Accepted: 26 August 2021

Published: 20 October 2021

Keywords: Institutional, Digitalization, Information Village Systems

Abstract

In the current digital era, the need for information technology for rural communities is an important thing that must be fulfilled. In this case, the village government must have a Village Information System (SID) for the community, based on advances in information technology. Based on the observations made, the condition of the District of Nengahan Trimurti, Bantul Regency, Yogyakarta has several main problems, namely not having a web-based information system at the hamlet level related to the hamlet profile, and the village information system is not yet optimal to support government administration activities. Methods of community service programs that are carried out as solutions to existing problems to support the strengthening of information technology-based hamlet institutions include first, identification and data collection will be carried out on the population and data related to the potential of the hamlet, carry out data management and data verification and create a format or design hamlet profile book and hamlet monograph board. In addition, it can optimize the Village Information System by creating a Padukuhan website. and, providing assistance with modem facilities to facilitate the internet network in Nengahan village so that it can help manage the Nengahan Village website for sustainable use. The Community Service Program through this information technology-based information system has declared that the community is able to strengthen the village institutions of Nengahan, Trimurti, Srandakan, Bantul. This is done through the creation of book profiles and monographs, website and social media development, as well as training and guidance for website admin officers. In order to maintain the strengthening of this IT-based institution, monitoring is the key to maintaining the effectiveness of strengthening the village based on the Village Information System.

Kata kunci: Kelembagaan, Digitalisasi, Sistem Informasi Desa

Abstrak

Di era digital saat ini perlu teknologi informasi bagi masyarakat desa menjadi hal penting yang harus dipenuhi. Dalam hal ini pemerintah

desa harus memiliki Sistem Informasi Desa (SID) untuk masyarakat, dengan berbasis pada kemajuan teknologi informasi. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, kondisi Kecamatan Nengahan Trimurti, Kabupaten Bantul Yogyakarta memiliki beberapa masalah utama, yaitu belum memiliki sistem informasi berbasis web di tingkat dukuh terkait dengan profil dukuh, sistem informasi desa yang belum optimal untuk mendukung kegiatan administrasi pemerintahan. Metode program pengabdian masyarakat yang dilakukan sebagai solusi dari masalah yang ada untuk mendukung digitalisasi kelembagaan dusun berbasis teknologi informasi diantaranya pertama, identifikasi dan pengumpulan data akan dilakukan pada populasi dan data yang berkaitan dengan potensi dusun, melakukan manajemen data dan verifikasi data dan membuat format atau desain buku profil dusun dan papan monograf dukuh. Selain itu dapat mengoptimalkan Sistem Informasi Desa dengan membuat situs web padukuhan serta pemberian bantuan fasilitas modem untuk memperlancar jaringan internet di Desa Nengahan sehingga dapat membantu pengelolaan situs *website* Desa Nengahan untuk digunakan secara berkelanjutan. Program Pengabdian melalui sistem informasi berbasis teknologi informasi ini telah dinyatakan masyarakat mampu memperkuat kelembagaan desa Nengahan, Trimurti, Srandakan, Bantul. Hal ini dilakukan melalui pembuatan buku-buku profil buku dan monograf, pengembangan situs web dan media sosial, serta pelatihan dan bimbingan bagi petugas admin *website*. Guna mewujudkan digitalisasi kelembagaan berbasis IT ini, *monitoring* menjadi kunci untuk terjaganya efektivitas digitalisasi desa berbasis Sistem Informasi Desa.

1. PENDAHULUAN

Hadirnya era globalisasi sangat dirasakan dari teknologi khususnya sistem informasi yang melahirkan digitalisasi. Digitalisasi dapat dimaknai sebagai bentuk proses dari penyimpanan seluruh sifat format baik dari teks, suara, gambar, atau multimedia dalam sebuah *string* elektronik dari nol dan satu bit. Dengan adanya digitalisasi memungkinkan menyimpan dan menyebarkan informasi dari berbagai media digital hingga dapat dilihat oleh seluruh dunia dengan hanya memakan waktu yang sangat singkat melalui jaringan internet (Arifin, et al., 2020). Terlebih pada era keterbukaan informasi dan digitalisasi publik telah mengubah paradigma masyarakat untuk lebih mendapatkan informasi yang lebih. Melalui digitalisasi, menghantarkan publik memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan melakukan komunikasi tanpa batas, termasuk memiliki hak informasi dan komunikasi bersama pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Didukung pula dengan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pemerintah harus memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, baik pada tataran pusat maupun daerah. Saat ini pemerintah desa menjadi salah satu lembaga publik yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang terbuka, efisien dan efektif serta bertanggung jawab sehingga melahirkan pula aturan terkait kebijakan pada tataran desa. Undang-

Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 86 ayat (4) menyatakan Sistem Informasi Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa, dan pembangunan kawasan perdesaan (Anwar & Sujai, 2020).

Kemampuan desa untuk mengelola penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat harus didukung oleh semua unsur yang menunjang untuk kesejahteraan masyarakat. Desa yang dapat menjalankan pengelolaan pembangunan secara mandiri akan mampu mengelola aset sumber daya yang dimiliki desa, serta mampu memperbaiki kebutuhan dasar warga dan kebutuhan hidupnya hingga memperjuangkan hak warganya (Mukhsin, 2020). Pelayanan publik di era digital saat ini sangat penting melibatkan teknologi informasi bagi masyarakat desa. Hal ini diperlukan terutama dalam hal kecepatan dan ketepatan informasi. Pemerintah desa harus memiliki sistem informasi desa untuk masyarakat, dengan berbasis pada kemajuan teknologi informasi. Dengan catatan aparatur pemerintah desa yang menjadi pelayan masyarakat harus bisa menguasai teknologi informasi sehingga pelayan kepada masyarakat dapat optimal (Asmara, 2019).

Sistem Informasi Desa (SID) menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan. Sistem Informasi Desa adalah proses dan aplikasi media berbasis komputer dan internet, pengelolaan informasi desa mendukung fungsi dan tugas pemerintah desa, yang didalamnya memuat administrasi kependudukan, perencanaan, pelaporan, pengelolaan aset, pengelolaan anggaran, layanan publik, transmisi informasi atas ke bawah atau sebaliknya, komunikasi lintas sektoral, komunikasi pemerintah desa dan Masyarakat, dan sebagainya (Mukhsin, 2020). Sistem Informasi Desa yang dirancang oleh pemerintah sejak tahun 2009 untuk membuka ruang partisipatif antara masyarakat dan perangkat desa dalam membangun desanya secara demokratis melalui penggunaan *software* terbuka. Secara teknis program ini diharapkan dapat membantu pemerintahan

desa dan warganya mendokumentasikan data-data milik desa menjadi lebih mudah dan dapat dimanfaatkan secara meluas oleh seluruh masyarakat desa. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus dapat memberikan pelayanan yang cepat dan tepat agar masyarakat merasakan kepuasan dalam menerima pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah (Lukman, 2000).

Wujud dari implementasi Sistem Informasi Desa yang dilakukan untuk tujuan pelayanan publik yakni dapat berupa mengadakan kanal *website* pemerintah desa sebagaimana menjadi salah satu wujud dari bentuk *E-Government* atau pelayanan publik berupa elektronik. Menurut Nursetiawan & Garis menyatakan, bahwa perkembangan informasi dan internet berdampak pula kepada pemerintah daerah yang harus memberikan informasi kepada masyarakat dengan media internet (Nursetiawan & Garis, 2018). Sehingga muncul sebuah konsep *E-Government* sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan tentunya saat ini kita telah memasuki era keterbukaan informasi publik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa desa yang telah mempunyai *website* desa. Heeks menjelaskan bahwasannya *E-Government* adalah kegiatan pemerintah menggunakan Teknologi Informasi (TI) untuk memberikan layanan kepada masyarakat (Heeks, 2006). Sehingga tujuan utama penggunaan *E-Government* untuk meningkatkan efisiensi dan keterbukaan informasi. *E-Government* di sini menjadi bentuk layanan kepada masyarakat yang lebih cepat dan terbuka. Sekelompok bahkan badan hukum memiliki kewajiban hak terhadap pelayanan publik (Hardiansyah, 2011). Ada tiga hal menjadi solusi dalam *E-Government* yakni tahap informasi, tahap interaksi, dan tahap transformasi (Backus dalam (Palvia et al., 2007)

Pedukuhan Nengahan Desa Trimurti Srandakan Bantul merupakan pedukuhan yang letaknya paling Timur di Desa Trimurti Srandakan Bantul Yogyakarta, yang memiliki 350 KK dengan mayoritas berpenduduk sebagai petani. Pedukuhan Nengahan sampai saat ini belum memiliki sistem informasi pedukuhan yang memadai yang berbasis TI terutama terkait data kependudukan dan informasi terkait

dengan potensi kegiatan masyarakat padukuhan yang sangat dibutuhkan untuk menunjang sistem informasi desa. Tersedianya data profil desa sangat dibutuhkan sebagaimana bentuk dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Daryono & Jaryono, 2014).

Melalui pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi bentuk tata kelola pemerintahan yang teratur. Beriringan dengan meluasnya peningkatan kebutuhan akan keterbukaan informasi yang akurat dan cepat pemerintah desa perlu berinovasi dan beradaptasi pada hal ini (Apriyansyah, et al., 2018). Melalui hal ini apabila Padukuhan Nengahan, Trimurti, Srandakan, Bantul dapat memanfaatkan perkembangan yang ada, maka mampu membawa desa semakin maju dan berkembang. Hadirnya internet menjadi fasilitas yang mempermudah masyarakat untuk mengakses dan memperoleh data secara bersama-sama (Putro, 2011).

Merujuk pada perkembangan digitalisasi sebagai sarana berkomunikasi dan penyebaran informasi dan Padukuhan Nengahan Desa Trimurti Srandakan Bantul memiliki potensi yang besar dari sumber daya manusia yang ingin berkembang dan belajar mengenai hal baru maka potensi desa yang besar ini adalah peluang untuk mewujudkan desa dengan digitalisasi program. Disamping itu Padukuhan Nengahan Desa Trimurti Srandakan Bantul Yogyakarta telah memiliki akses internet yang cukup baik. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah di paparkan, pengabdian ini bertujuan untuk mewujudkan digitalisasi kelembagaan pedukuhan melalui sistem informasi berbasis IT di Pedukuhan Nengahan Trimurti Srandakan Bantul Yogyakarta agar semakin mudah dalam melakukan komunikasi dan informasi khususnya terkait himbauan dan kebijakan untuk kemaslahatan masyarakat di Pedukuhan Nengahan Trimurti Srandakan Bantul Yogyakarta.

2. METODE

Korten (2002) menyatakan konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat (*People Centred Development*) memandang inisiatif rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang paling utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang ingin dicapai.

Upaya untuk melaksanakan pembangunan yang berpusat pada rakyat dilakukan melalui pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya merupakan upaya untuk mengubah keberadaan masyarakat menjadi lebih mandiri, produktif, dan sejahtera (Korten, 2002).

Proses pemberdayaan masyarakat bertujuan: 1) Agar masyarakat mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahannya sendiri, 2) Memfasilitasi agar masyarakat mampu merumuskan beberapa alternatif pemecahan masalahnya, dan 3) Mendorong masyarakat agar mampu menggali potensinya sekaligus mengembangkannya. Memberdayakan masyarakat bertujuan "mendidik masyarakat agar mampu mendidik diri mereka sendiri" atau "membantu masyarakat agar mampu membantu diri mereka sendiri" (Korten, 2002). Tujuan yang akan dicapai melalui usaha pemberdayaan masyarakat, adalah masyarakat yang mandiri, berswadaya, mampu mengadopsi inovasi, dan memiliki pola pikir yang *cosmopolitan*.

Berikut tahapan pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat melalui Program Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN- PPM) sebagai berikut:

1. Persiapan dan pembekalan KKN-PPM
 - a) Rekrutmen peserta KKN-PPM UMY dilakukan melalui pendaftaran peserta melalui KRS *online* setiap mahasiswa, kemudian mengumpulkan berkas prasyarat kepada LP3M UMY,
 - b) Persiapan logistik (sarana/prasarana/perengkapan) kebutuhan mahasiswa untuk pelaksanaan KKN PPM (misalnya kit, *uniform*, bahan referensi, dll),
 - c) Pembekalan mahasiswa peserta KKN-PPM UMY, dilakukan untuk memberikan bekal bagi mahasiswa untuk melaksanakan program. Kegiatan ini dilakukan oleh LP3M UMY,
 - d) Pelaksanaan KKN-PPM UMY (penerjunan, pelaksanaan kegiatan dan koordinasi lapangan, penarikan),
 - e) *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan KKN-PPM UMY,
 - f) Rencana Tindak Lanjut (RTL)

dilaksanakan secara partisipatif melibatkan masyarakat, pemerintah desa, instansi terkait, LP3M UMY dan mahasiswa), dan

- g) Pelaporan dan publikasi hasil KKN-PPM UMY.

2. Pelaksanaan

Kegiatan Program Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN- PPM) dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yaitu:

- a) FGD dengan tokoh masyarakat dan pemerintah desa setempat terkait program pelaksanaan KKN-PPM,
- b) Pembuatan buku profil Dusun Nengahan Desa Trimurti Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta secara lengkap,
- c) Pembuatan *website* desa yang nantinya dapat digunakan oleh warga Padukuhan Nengahan dalam mengakses informasi secara lengkap,
- d) Pembuatan media sosial berupa

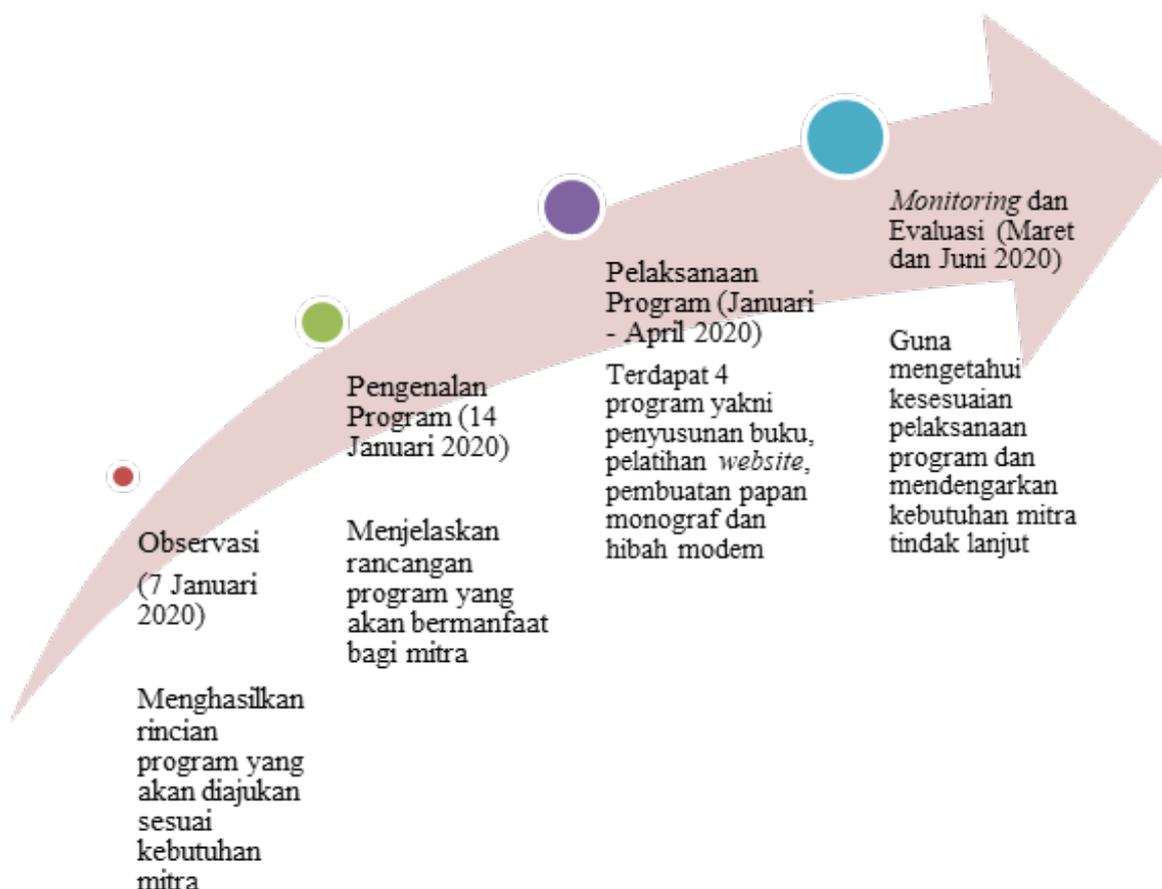
Instagram dan *Facebook* desa yang nantinya dapat digunakan sebagai media promosi Padukuhan Nengahan, dan

- e) Pelatihan dan pendampingan pengelola website dan media sosial desa.

3. Rencana keberlanjutan Program

- a) Penyusunan buku profil dusun untuk selanjutnya dilakukan pada tingkat desa, dengan mengacu pada data yang ada pada buku profil setiap dusun. Sehingga buku profil desa nantinya sudah sesuai dengan dengan kondisi nyata yang ada di desa.
- b) Perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi secara rutin untuk memastikan terlaksananya kegiatan KKN-PPM sesuai dengan yang direncanakan.

Pelaksanaan program dilaksanakan pada tanggal 20 Januari hingga 8 Agustus 2020. Adapun *flowchart* pengabdian masyarakat di Dusun Nengahan sebagai berikut:



Dari tahapan pelaksanaan yang dilakukan maka pengabdian ini dapat menghasilkan diantaranya: (1) Penyusunan buku profil Dusun yang lengkap. Profil dengan memuat informasi secara detail mengenai kondisi dan potensi serta data kependudukan yang ada. Sehingga profil ini bisa digunakan untuk mendukung tersusunnya RPJMDes yang sesuai dengan kondisi nyata masyarakat; (2) Papan monograf dusun yang lengkap. Monograf dusun dapat digunakan untuk mendukung tersusunnya RPJMDes yang sesuai dengan kondisi nyata masyarakat; dan (3) Membuat *website* pedukuhan yang memuat data lengkap kependudukan warga, potensi yang ada di Dusun Lungguh, kegiatan yang dilakukan warga, dan kritik saran dari warga setempat. Dengan adanya web ini warga setempat akan dapat mengakses informasi perkembangan desa setiap saat sehingga akan lebih efisien dan efektif lagi. Website ini akan terus digunakan oleh perangkat desa untuk membagikan informasi ke masyarakatnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Buku Profil Guna Pendukung Digitalisasi Desa Nengahan, Srandakan Bantul

Desa adalah sumber data paling akurat untuk pencarian data kependudukan. Untuk itu, cara pengumpulan data penduduk, pengisian data dalam format, pengolahan data hingga penyajian informasi data kependudukan kepada masyarakat harus dilakukan secara efektif dan efisien agar informasi yang tersampaikan dapat dengan cepat dan akurat. Masyarakat desa sangat mengharapkan adanya digitalisasi pelayanan dan informasi kependudukan (Ardhana, 2019). Guna mendukung adanya digitalisasi pelayanan dan informasi kependudukan, langkah awal yang perlu dipersiapkan yakni buku profil sehingga menjadi acuan dari input data kependudukan berbasis digital.

Sehingga kegiatan Pemberdayaan KKN-PPM ini merancang dan menyusun Buku Profil Dusun Nengahan Desa Trimurti, Srandakan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta secara lengkap dan detail. Sehingga perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan kondisi serta potensi desa. Buku Profil Dusun Nengahan telah diterbitkan dan diberikan kepada Padukuhan Nengahan



Gambar 1. Buku Profil Nengahan, Srandakan, Bantul

Sumber: Dokumen Pribadi

serta Kelurahan Desa Trimurti. Pemanfaatan informasi profil desa dan kelurahan (*uses*) oleh pengguna informasi untuk berbagai kebutuhan (*gratification*) sejalan dengan teori *Uses and Gratification* yang diperkenalkan oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz yang mengatakan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media, dengan kata lain, pengguna media adalah pihak yang aktif dalam proses komunikasi (Achsin, et al., 2015).

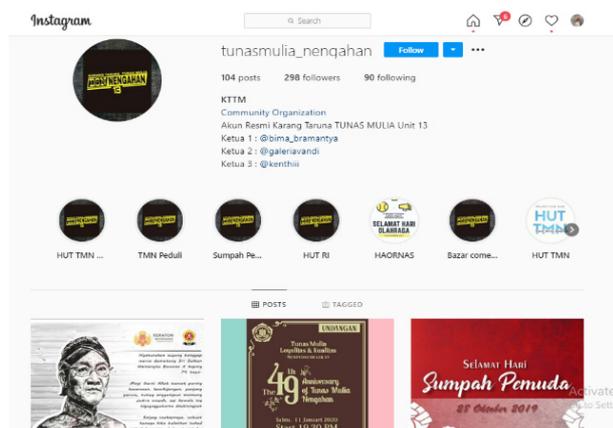
Pembuatan *Website* Padukuhan Nengahan

Bentuk digitalisasi yang berkaitan dengan penguatan Sistem Informasi Desa yakni membuat *website*. *Website* atau disingkat web, dapat diartikan sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa laman yang berisi informasi dalam bentuk data digital baik berupa *text*, gambar, video, audio, dan animasi lainnya yang disediakan melalui jalur koneksi internet (Christian, et al., 2018). *Website* adalah salah satu bentuk uang yang dapat memberikan manfaat besar baik untuk pemerintah maupun warganya. Melalui *website* pemerintah telah menerapkan SID yang menjadi salah satu bentuk yang diprioritaskan sesuai dengan aturan Undang-Undang Desa Tahun 2014 dan tertuang dalam Permendes 22 Tahun 2016.

Website Padukuhan Nengahan dapat meningkatkan komitmen pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi dalam memberikan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat yang berbasis IT, yaitu melalui *website* desa ini berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi

dalam kegiatan penyelenggaraan desa, misalnya seperti kegiatan ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan desa dan ikut mengawasi serta memberikan masukan kepada pemerintah desa. *Link website* dapat diakses pada <https://trimurti-bantul.desa.id/>. Tidak hanya *website*, padukuhan Nengahan turut diberikan pelatihan untuk mengelola *Instagram*, berikut tampilan *Instagram* Padukuhan Nengahan yang dikelola oleh Karang Taruna Tunas Mulia Nengahan dengan *link* https://www.instagram.com/tunasmulia_nengahan/.

Apabila ditinjau pada prespektif komunikasi, kehadiran media dengan bantuan internet yakni berupa *website* dan media sosial lainnya mampu bertukar informasi dan komunikasi dengan cepat dan efisien secara luas dan dapat diakses oleh khayalak luas. Selain itu *website* turut menjadi sarana untuk menunjukkan kondisi desa, publikasi kegiatan desa, meningkatkan pelayanan desa yang lebih baik, sumber data dan informasi tentang desa 24 jam, sebagai media pengaduan, dan penerimaan aspirasi masyarakat. Tidak hanya itu, *website* turut menjadi media pemasaran potensi desa, media pelaporan progres pembangunan, media informasi kepada masyarakat, warga dapat lebih berpartisipasi aktif dalam pengembangan desa, dan mewujudkan kantor desa yang lebih efektif. Oleh karena itu, kehadiran media sosial dan *website* ini mampu mendukung digitalisasi kelembagaan desa di Pedusunan Nengahan, Trimurti, Srandakan, Bantul DIY.



Gambar 2. Profil *Instagram* Karang Taruna Tunas Mulia Nengahan

Sumber : https://www.instagram.com/tunasmulia_nengahan/

Pembuatan Monograf

Berdasarkan hasil *initial assessment* pada saat sebelum dilaksanakannya pengabdian, Dusun Nengahan belum memiliki monografi yang dapat mendeskripsikan keadaan dusun. Monografi merupakan suatu himpunan data daerah/desa diberbagai bidang yang disajikan dalam bentuk buku maupun dalam bentuk papan informasi. Monografi memberikan gambaran informasi mengenai keadaan penduduk yang disajikan per-sub wilayah desa (Setiawan, 2015). Program pembuatan, peta dan papan monograf dusun yang lengkap dapat digunakan untuk mendukung tersusunnya RPJMDes yang sesuai dengan kondisi nyata masyarakat.

Adapun tujuan penyusunan monografi kecamatan diantaranya: (1) Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan, (2) Sebagai sarana pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan kecamatan, (3) Sebagai kontrol data dan keberadaan masyarakat hukum adat dan lembaga kemasyarakatan, (4) Memberikan pedoman dan pelatihan, (5) Sebagai sarana yang menentukan dalam lomba-lomba tingkat kecamatan, dan (6) Sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan program dan kegiatan akselerasi kesejahteraan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan, penanganan bencana, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana, memanfaatkan sumber daya dan teknologi tepat guna, serta pengembangan sosial budaya masyarakat (Peraturan Bupati Pasaman No. 25 Tahun 2014 tentang monografi, dalam Setiawan, 2015).



Gambar 3 Monograf Dusun Nengahan, Trimurti, Srandakan, Bantul

Sumber: Dokumen Pribadi



Gambar 4. Pemberian Modem
Sumber: Dokumen Pribadi

Digitalisasi Desa dengan Hibah Modem

Modulator demodulator atau yang sering disebut Modem yang dapat diartikan sebagai perangkat keras yang berfungsi sebagai alat komunikasi yang berjalan dua arah. Walaupun pada dasarnya semua alat komunikasi dari jarak jauh, namun modem merupakan alat komunikais yang bersifat dua arah dan selalu menggunakan VSAT, *Microwave Radio* yang juga dibutuhkan dalam penyampaian informasi. Modem lebih sering digunakan sebagai perangkat keras untuk komunikasi melalui internet pada komputer. Modem juga diperuntukkan agar mendapatkan akses jaringan yang bersifat *portable* sehingga dapat memudahkan penggunaanya.

Melalui modem maka akan menghadirkan *Wi-Fi* yang menjadi kebutuhan dalam mendukung kegiatan digitalisasi Desa Nengahan. *Hotspot* atau *Wi-Fi* adalah singkatan dari *Wireless Fidelity* yaitu sebuah media penghantar komunikasi data tanpa kabel yang bisa digunakan untuk komunikasi atau mentransfer program dan data dengan kemampuan yang sangat cepat. *Wi-Fi* juga dapat diartikan teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data dengan menggunakan gelombang radio (nirkabel) melalui sebuah jaringan komputer, termasuk koneksi internet berkecepatan tinggi (Karim, et al., 2016).

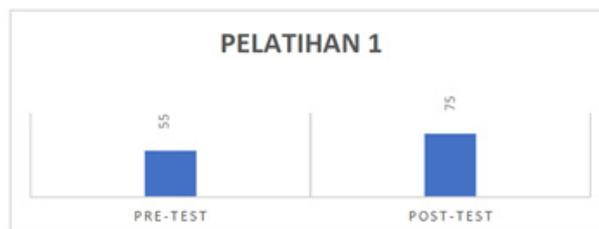
Melihat hal tersebut, sebagaimana untuk mendukung kelancaran pengelolaan *website* dan media sosial berbasis IT diberikan pula modem sebanyak agar memudahkan pengelola menjalankan *website* dan media sosial tersebut.

Hadirnya modem ini akan membantu dalam digitalisasi kelembagaan Dukuh Nengahan dalam penyampaian informasi dan komunikasi yang digunakan secara berkelanjutan.

Pelatihan Tim Kreatif Desa

Sebagai bentuk program dukungan dalam digitalisasi kelembagaan melalui sistem informasi maka dibuat pelatihan sebanyak 2 kali dan disetiap pelatihan tersebut dilakukan *pre* dan *post test*. Hal tersebut berguna untuk melihat kemampuan peserta yang menjadi target pelatihan sehingga nanti setelah adanya pelatihan ini wawasan serta skill peserta dapat bertambah dan meningkat sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pelatihan ini dibuat.

Pada pelatihan pertama dari *pretest* dan dilanjutkan dengan *post test* yang dilakukan terjadi peningkatan wawasan mengenai sistem informasi *online*. Pada *pretest* hanya 55% peserta yang memahami mengenai sistem informasi *online* desa dan setelah dilakukan pelatihan dan diadakan *post test* peserta yang memahami mengenai sistem informasi *online* desa menjadi sebesar 75% dari hal tersebut pada pelatihan pertama ini mengenai pelatihan pengenalan dan pembuatan sistem informasi *online* (media sosial) desa bisa dikatakan berhasil.



Gambar 5. Peningkatan Pelatihan Sistem Informasi Online

Sumber: Olah Data Tim Pengabdian



Gambar 5 Peningkatan Tata Nilai

Sumber: Olah Data Tim Pengabdian

Setelah pelatihan pertama mengenai pengenalan dan pembuatan sistem informasi *online*, dilakukan pelatihan kedua yaitu menjadi admin media sosial dan pembuatan serta pengisian konten.

Pada pelatihan kedua saat *pretest* dalam memahami materi yang diberikan hanya 45% peserta yang memahami tugas pokok admin dan pembuatan serta pengisian konten. Setelah dilakukan pelatihan dan dilakukan *post test* pemahaman peserta mengenai materi menjadi 80%. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa pelatihan ini berhasil menambah dan meningkatkan wawasan serta tata nilai masyarakat bersosial dan ketentraman dari sebuah pelatihan.

4. SIMPULAN

Program Pengabdian Masyarakat Digitalisasi Kelembagaan Pedukuhan melalui Sistem Informasi Berbasis IT di Dusun Nengahan Trimurti Srandakan Bantul Yogyakarta telah berhasil dari menghasilkan Buku Profil Dusun Nengahan Desa Trimurti Srandakan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta secara lengkap dan detail. Sehingga perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan kondisi serta potensi desa. Buku Profil Dusun Nengahan telah diterbitkan dan diberikan kepada Padukuhan Nengahan serta Kelurahan Desa Trimurti.

Dilakukannya pelatihan sistem informasi *online*, hal ini berdampak pada peningkatan komitmen pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi dalam memberikan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat yang berbasis IT yaitu melalui *website* desa ini berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan desa, misalnya

seperti kegiatan ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan desa dan ikut mengawasi serta memberikan masukan kepada pemerintah desa.

Pembuatan *website* padukuhan, akun media sosial lain yang telah dibuat adalah media sosial yang nantinya dapat digunakan oleh warga pedukuhan Nengahan dalam mengakses informasi secara lengkap. Selain itu untuk mendukung pengelolaan *website* dan media sosial berbasis IT diberikan dua buah modem sehingga digitalisasi kelembagaan Padukuhan Nengahan Desa Trimurti berbasis IT dapat berjalan dengan baik.

Saran untuk pelaksanaan pemberdayaan selanjutnya yakni akan jauh lebih baik untuk dapat melakukan pemberdayaan terkait pengelolaan *website* desa berbasis IT dengan pendekatan kreativitas serta melibatkan pemuda sekitar untuk mengolah data-data profil penduduk Dusun Nengahan. Selain pemberdayaan pengelolaan *website* berbasis IT dapat dikembangkan sebagai media untuk promosi desa yang mana Dusun Nengahan, Trimurti, Srandakan Bantul dapat dikelola menjadi objek desa wisata.

5. PERSANTUNAN

Pengabdian dan penulisan artikel ini tentu didukung oleh berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan *support* secara penuh kegiatan pengabdian pada program Kuliah Kerja Nyata, Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Digitalisasi Kelembagaan Pedukuhan melalui Sistem Informasi Berbasis IT di Dusun Nengahan Trimurti Srandakan Bantul Yogyakarta, serta pemerintah maupun warga wilayah Trimurti, Srandakan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

REFERENSI

- Achsin, S. N., Cangara, H., & Unde, A. A. (2015). Profil Desa dan Kelurahan sebagai Sumber Inforasi. *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 4(4), 11–18.
- Anwar, A. ., & Sujai, I. (2020). Analisis Implementasi Sistem Informasi Desa Terintegrasi di Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Moderat*, 6(4), 849–856.

- Apriyansyah, Maullidina, I., & Purnomo, E. P. (2018). Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) dalam Pelayanan Publik di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 4(1), 19–27.
- Ardhana, V. Y. P. (2019). Sistem Informasi Data Kependudukan Desa Berbasis Web. *Journal Sains Tech Innovation*, 2(2), 1–5.
- Arifin, Z., Budi Wahono, B., Prihatmoko, D., & Riyoko, S. (2020). Inovasi Peningkatan Hasil Tangkapan Ikan Produk Unggulan Daerah oleh Nelayan Purse Seine Menggunakan Teknologi GPS. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 3(1), 54–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/jipemas.v3i1.4779>
- Asmara, J. (2019). Rancang Bangun Sistem Informasi Desa Berbasis Website (Studi Kasus Desa Netpala). *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi (JUKANTI)*, 2(1), 1–7.
- Christian, A., Hersinto, S., & Agustina. (2018). Rancang Bangun Website Sekolah dengan Menggunakan Framework Bootstrap (Studi Kasus SMP Negeri 6 Prabumulih). *Jurnal SISFOKOM*, 7(1), 22–27.
- Daryono, & Jaryono. (2014). Pengembangan Inovasi Administrasi Pemerintah Desa Model E-Governmrnt Berbasis Information Technology. *Jurnal & Proceeding FEB Unsoed*, 14(22), 29.
- Hardiansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Heeks, R. (2006). *Implementng and Managing E-Government*. London: Sage Publications Limited.
- Karim, R., SUMENDEP, S. S., & Koagouw, F. V. I. . (2016). Pentingnya Penggunaan Jaringan Wifi dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Pemustaka. *E-Journal "Acta Diurna,"* 5(2), 1–2.
- Korten, D. C. (2002). *Menuju Abad Ke-21; Tindakan Sukarela dan Agenda Global*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lukman, S. (2000). *Manajemen Kualitas Pelayanan*. Jakarta: STIA LAN Press.
- Mukhsin. (2020). Peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi Menerapkan Sisem Informasi Desa dalam Publikasi Informasi Desa di Era Globalisasi. *TEKNOKOM*, 3(1), 7–16.
- Nursetiawan, I., & Garis, R. R. (2018). No Title. Analisis Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata. *Moderat*, 4(3), 151–162.
- Palvia, S. C., & Jain dan Sharma, S. S. (2007). E-Government and EGovernance: Definitions/Domain Framework and Status around the World. *5TH International Conference On E-Governance*.
- Putro, T. W. (2011). *Pembangunan Sistem Informasi Rumah Sakit untuk Mendukung Pelayanan Pasien di Rumah Sakit Umum Patmasuri Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Setiawan, K. (2015). *Pemetaan Data Monografi Kecamatan Pringsewu Tahun 2014*. Lampung: Universitas Lampung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F